KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

MASIH TUTUP: Petugas memeriksa kondisi kolam tempat wisata air di Umbul Cokro, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (1/9). Meskipun Kabupaten Klaten turun ke Level 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), lokasi wisata air di daerah tersebut masih ditutup bagi wisatawan.

REKOMENDASI KONGRES

Musik Tradisi Masuk Pendidikan Formal

JAKARTA (KR) - Kongres Musik Tradisi Nusantara menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya menyediakan dan memasukkan pembelajaran musik tradisi Nusantara dalam pendidikan formal dan informal.

"Kongres yang diselenggarakan beberapa hari terakhir merekomendasikan pembelajaran musik tradisi di jenjang pendidikan formal maupun informal. Ini yang nantinya akan kita sesuaikan pembelajarannya dengan jenjang pendidikannya," ujar Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (1/9).

Pembelajaran musik tradisi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menurut Hilmar Farid, berbeda dengan jenjang lebih lanjut. Pembelajaran tersebut juga disesuaikan dengan sumber daya manusia. "Kita berharap ketersediaan tenaga pengajar di sekolah mencukupi," kata Hilmar.

Rekomendasi lainnya menurut Hilmar, yakni pentingnya melakukan sistem pendataan musik tradisi Nusantara, baik yang terdapat di dalam maupun di luar negeri yang akan disimpan pada Pusat Pangkalan Data Kemendikbudristek dan Kemenkumham.

Berikutnya, perlunya menerbitkan payung hukum di pemerintahan pusat maupun daerah, serta mengimplementasikan peraturan perundang undangan yang ada, tentang perlindungan musik tradisi melalui pengelolaan dana CSR dari berbagai perusahaan untuk kelestarian musik tradisi.

Juga perlu mensinergikan model konsep dan cara kerja Pentahelix dalam menjaga ekosistem serta pengembangan musik tradisi Nusantara. Selanjutnya, mengintegrasikan sistem pendidikan formal, informal, dan kultural sebagai model pendidikan Merdeka Belajar untuk menguatkan pemahaman tentang keberagaman serta penguatan identitas kebangsaan.

Hilmar menjelaskan, pentingnya memberdayakan para maestro musik tradisi Nusantara untuk dilibatkan secara aktif sebagai bentuk konkret dalam membangun ekosistem pendidikan berbasis budaya. **(Ati)-f**

SEBAGIAN WILAYAH INDONESIA

Berpotensi Mengalami Bahaya Kekeringan

JAKARTA (KR) - Sejumlah daerah di Indonesia berpotensi mengalami bahaya kekeringan. Sementara sebagian daerah lainnya akan memasuki musim hujan pada September hingga November 2021.

"Daerah yang mengalami kekeringan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali dan Jawa Timur. Menghadapi potensi kekeringan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta kepala daerah di provinsi tersebut untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan," ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB Dra Prasinta Dewi MAP dalam siaran persnya, Rabu (1/9).

Melalui surat nomor B-121/ BNPB/DII/BP.03.02/08/2021, BNPB menyampaikan peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan meteorologis. Hal ini didukung informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai adanya indikasi potensi kekeringan hidrometeorologis hingga dua dasarian ke depan. Potensi yang patut diwaspadai mencakup beberapa kabupaten dan kota di Provinsi NTT, NTB, Bali dan Jawa Timur.

Potensi bahaya yang perlu diantisipasi yaitu berkurangnya persediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, kebakaran semak, hutan, lahan dan pemukiman.

Menurut Prasinta Dewi, sejumlah langkah kesiapsiagaan perlu dilakukan. Pertama, Pemda diminta untuk melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan bersama dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekeringan serta potensi kebakaran hutan, lahan dan semak.

Kedua, kepala daerah mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat terkait ancaman kekeringan di daerah masing-masing. "Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak kekeringan meteorologis sehingga masyarakat dapat menghemat penggunaan air bersih dan juga melakukan budidaya pertanian yang tidak membutuhkan banyak air," kata Prasinta.

Pemda diharapkan untuk aktif dalam mengkampanyekan hemat air, salah satunya dengan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk digunakan kembali.

Masih terkait langkah kedua ini, Prasinta menekankan pada upaya antisipasi kekeringan dengan penyiapan logistik dan peralatan seperti tangki air bersih dan pompa air di lokasi yang membutuhkan.

Ketiga, kesiapsiagaan dengan memanfaatkan sistem informasi yang dikelola Lapan dan BMKG, pengecekan serta penyiapan sarana dan prasarana yang membantu pemadaman.

Ia juga menekankan koordinasi antarpara pemangku kepentingan dalam kesiapan mekanisme tanggap darurat serta penyiapan untuk mempelajari rencana kontinjensi dan penyiapan rencana operasi. Langkah ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan setempat. **(Ati)-f**

VAKSINASI COVID-19

Tembus 100 Juta Dosis

JAKARTA (KR) - Vaksinasi Covid-19 di Indonesia mencapai 100 juta dosis hingga 31 Agustus 2021. Cakupan vaksinasi dengan 100 juta dosis tersebut merupakan kombinasi total vaksinasi dosis pertama, vaksinasi dosis kedua, dan booster vaksin.

Demikian Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) dr Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (1/9).

Nadia mengatakan, keberhasilan mencapai 100 juta dosis vaksin tersebut sesuai dengan peta jalan Pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. "Capaian 100 juta dosis vaksin tersebut merupakan kombinasi total vaksinasi dosis pertama, vaksinasi dosis kedua, dan booster vaksin," katanya.

Dijelaskan, cakupan vaksinasi itu terdiri dosis pertama sebanyak 63,4 juta dosis, dosis kedua 36,05 juta, dan vaksinasi dosis ketiga yakni booster yang diberikan untuk tenaga kesehatan sebanyak 640.532 dosis. "Kami sampaikan untuk tenaga kesehatan dosis ketiga sudah mencapai 640.000, dan dosis pertama dan proses dosis kedua sudah mencapai angka 100 persen," ungkapnya.

Walaupun begitu, Nadia menjelaskan, Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lanjut usia (lansia) yang baru mencapai 5,3 juta dosis. **(Ati)-d**

UMK SANGAT BERKEPENTINGAN

Pembiayaan Gratis Sertifikasi Halal

JAKARTA (KR) - Hampir dua tahun pandemi yang melanda dunia, berdampak pada semua sektor, termasuk ekonomi. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menilai kebijakan pembiayaan gratis untuk proses sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil (UMK) sangat relevan.

"Dalam konteks pandemi Covid-19 sekarang ini, kebijakan pembiayaan gratis sertifikasi halal UMK sangat relevan," terang Wamenag saat berbicara pada webinar tentang 'Sertifikasi Halal dan Perpanjangannya di Masa Pandemi', Rabu (1/9). Webinar ini digelar Indonesia Halal Watch (IHW).

Hadir sejumlah narasumber, yaitu Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki, Ketua MUI Salahuddin Alayubi, Direktur Ekskutif IHW Ikhsan Abdullah dan Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati. "Bangkitnya UMK yang merupakan pilar penting perekonomian nasional diharapkan mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasinal kita," sambungnya.

Selain pembiayaan gratis, regulasi sertifikasi halal sekarang juga memberi kemudahan lain berupa opsi kepada pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha atau *self-declare*. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Wamenag menegaskan, industri halal saat ini semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Sertifikasi halal sekarang menjadi salah satu syarat wajib bagi produk untuk dapat diterima di negara-negara tujuan ekspor, khususnya negara berpenduduk mayoritas muslim. "Negara-negara anggota OKI merupakan potensi strategis bagi produk halal nasional," tegasnya.

Berdasarkan data OIC Economic Outlook 2020, lanjut Wamen, di antara negara-negara anggota OKI, Indonesia masih menjadi eksportir produk muslim terbesar kelima dengan proporsi 9,3%. Dengan berbagai potensi dan modal halal yang dimiliki, Indonesia patut optimis menjadi peringkat pertama.

"Terlebih, saat ini BPJPH bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai juga tengah melakukan koordinasi pembenahan kodifikasi produk halal nasional," sebutnya.

Wamenag mendorong BPJPH mampu mensinergikan potensi yang dimiliki Indonesia untuk mendukung pengembangan industri halal nasional yang berorientasi global. Oleh karena itu, integrasi layanan sertifikasi halal mutlak dilakukan. Apalagi penyederhanaan proses sertifikasi halal dan limitasi waktu pengurusan menjadi 21 hari, mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam layanan sertifikasi halal mesti melakukan langkah-langkah pembenahan secara terukur.

"Kerja sama internasional yang menjadi konsen sebagai jalur penting penerimaan sertifikat halal dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produk halal global juga harus menjadi perhatian," ujarnya. **(Ati)-d**

Pemda Perlu Perkuat Pengawasan Internal

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat pengawasan internal dengan meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Hal tersebut diungkapkan Mendagri Tito Karnavian saat memberi arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) dan Launching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP), secara virtual di Jakarta, Rabu (1/9).

"Penguatan APIP menjadi penting dari kualitas personelnya, dengan melalui pelatihan-pelatihan teknis terus-menerus," kata Tito .

Mendagri menilai, pengawasan tersebut penting demi mengurangi moral hazard untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi. Selain melalui pelatihan, terang Mendagri, upaya penguatan pengawasan internal juga dapat dilakukan dengan menunjuk orang yang profesional di bidangnya melalui pola rekrutmen dan memberikan pembinaan karier yang baik. Ini akan memberikan kepastian dalam pembinaan karier di jajaran inspektorat daerah sehingga bisa menjadi lebih profesional.

Selain itu, pemda juga dapat mengalokasikan pembiayaan pengawasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang memadai. Tito menegaskan, hal ini merupakan diskresi dari masing-masing kepala daerah yang prinsipnya untuk memperkuat APIP.

Adapun sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat pengawasan internal, di antaranya melalui perbaikan sistem pengawasan bertingkat di provinsi maupun kabupaten/kota serta sistem pelaporan berbasis digital, seperti SIPD, SP4N LAPOR dan Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT).

Kemudian terdapat juga Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang merupakan inisiasi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Untuk itu Tito menyampaikan, penguatan pengawasan internal juga dapat mengurangi temuan-temuan dari pihak eksternal. **(Sim)-d**

HINDARI MODUS JUAL BELI JABATAN

Kepda Harus Jauhi Penyalahgunaan Wewenang

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam periode 2016-2021 mencatat ada tujuh kasus jual beli jabatan yang dilakukan kepala daerah (kepda) dan kasusnya ditangani KPK. Jual beli jabatan, menurut Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah.

"Terkait hal itu, KPK mencatat kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemda sejak 2016 hingga 2021 ini telah melibatkan tujuh bupati, yakni Bupati Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjungbalai dan terakhir Probolinggo," jelas Ipi di Jakarta, Rabu (1/9).

Ketujuh kepala daerah tersebut, Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Walikota Tanjungbalai M Syahrial dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.

Ipi menegaskan, dengan terus berulangnya kasus korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah, KPK mengingatkan kepada para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. "Dalam hal ini khususnya proses lelang jabatan, rotasi, mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya," ujarnya.

Terkait jual beli jabatan, diakuinya, menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah. Oleh karena itu, dari hasil pemetaan KPK atas titik rawan korupsi di daerah, KPK mengidentifikasi beberapa sektor yang rentan terjadi korupsi, yaitu di antaranya terkait belanja daerah seperti pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, lanjutnya, korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat dan korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan. Karena itu, kata Ipi, upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Sehubungan hal itu, KPK telah mendorong diimplementasikannya Monitoring Center for Prevention (MCP) dan manajemen ASN merupakan salah satu dari delapan fokus area intervensi perbaikan tata kelola Pemda yang terangkum dalam aplikasi tersebut.

Dalam kesempatan itu menyebutkan tentang kedelapan area intervensi tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa. **(Ful)-f**

KR-Antara/Maulana Surya

BALEKAMBANG DIBUKA KEMBALI: Pengunjung berjalan di kawasan Taman Balekambang Solo, Jawa Tengah, Rabu (1/9). Pemerintah Kota Solo mulai menguji coba pembukaan sejumlah objek wisata lingkungan terbuka dengan pedoman Surat Edaran Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka tentang PPKM Level 3 guna mencegah penyebaran Covid-19.